

BAB III

KONDISI DAN PERLAKUAN TAWANAN PERANG DI PENJARA ABU GHARAIB DALAM KONFLIK IRAK DAN AMERIKA SERIKAT

A. Asal Usul Terjadinya Konflik Irak dan Amerika Serikat

Konflik Amerika Serikat dan Irak dimulai sejak terjadinya Perang Teluk tahun 1991 dilatarbelakangi oleh serangan Irak ke Kuwait. Serangan tersebut membawa konsekuensi dijatuhkannya sanksi Perserikatan Bangsa-Bangsa terhadap Irak. Ada 2 (dua) sanksi yang dijatuhkan, yaitu pertama, sanksi ekonomi berupa embargo ekonomi; kedua, sanksi militer berupa pengiriman pasukan Amerika Serikat dan Inggris ke kawasan teluk.

Setelah itu konflik AS dan Irak dipicu oleh serangan teroris 11 September 2001 yaitu pembajakan yang dilakukan oleh kelompok militan Al-Qaeda yang di pimpin oleh Osama bin Laden Para pembajak sengaja menabrakkan dua pesawat ke Menara Kembar *World Trade Center di New York City (WTC)*. Pada pukul 8.45 waktu New York 11 September 2001, sebuah pesawat Boeing 767 milik *American Airlines* menabrak menara utara dari gedung World Trade Center. Tabrakan dari pesawat yang membawa bahan bakar penuh sekitar 20 ribu galon, menimbulkan lubang besar di lantai 80 dari gedung pencakar langit setinggi 110 lantai ini. 18 menit kemudian. Pesawat Boeing 767 milik *United Airlines* dengan nomor penerbangan 175, terlihat di udara. Pesawat itu berbelok tajam dan langsung mengarah ke gedung WTC, dan menghantam lantai 60.⁶¹

⁶¹ “Serangan September 2001”, Loc.Cit

Konflik ini semakin memuncak dengan adanya tuduhan kepemilikan Irak atas senjata pemusnah massal (*weapons of mass destructions*). Oleh karena itu Tim Inspeksi Senjata Perserikatan Bangsa-Bangsa, yaitu UNMOVIC (*United Nations on Monitoring Verification on Commision*) dibentuk untuk melakukan pemeriksaan ke Irak, meskipun pada awalnya Irak menolak untuk bekerjasama, namun pada akhirnya Irak bersedia untuk bekerjasama dengan mengizinkan tim tersebut untuk melakukan tugasnya di Irak. Hasil pemeriksaan Tim Inspeksi Senjata Perserikatan Bangsa-Bangsa menunjukkan bahwa Irak tidak terbukti memiliki senjata pemusnah massal. Akan tetapi Amerika Serikat tetap berpendapat bahwa Irak masih memiliki senjata pemusnah massal.⁶²

Setelah terjadinya peristiwa 11 September 2001, pemerintah Amerika Serikat (AS) membawa perubahan besar bagi dalam penyusunan kebijakannya, baik dalam kebijakan nasional maupun kebijakan luar negeri. Khususnya dalam kebijakan peningkatan keamanan nasional AS, yang terlihat melalui peningkatan anggaran militernya dan dimulainya berbagai operasi yang mengincar kelompok-kelompok teroris di dunia. Peristiwa tersebut dianggap sebagai bentuk serangan terorisme yang didukung oleh Saddam Hussein pemimpin di Irak. Sehingga keberadaan Irak selama masih dipimpin oleh Saddam Hussein dianggap sebagai sumber ancaman yang membahayakan keamanan domestik AS maupun internasional. Irak dianggap sebagai sumber ancaman yang memiliki potensi berkembangnya terorisme, sehingga harus

⁶² Fersy Hana, Loc.Cit

dapat diantisipasi. Dengan demikian dikeluarkanlah kebijakan Operasi pembebasan Irak (Invasi Irak), yang menggunakan kekuatan militer untuk mengantisipasi ancaman tersebut. Invasi Irak dapat dikategorikan sebagai bentuk antisipasi ancaman dan serangan teroris.

Tujuan-tujuan resmi yang ditetapkan oleh Pemerintahan Bush waktu itu dalam menginvasi Irak ialah untuk melucuti senjata pemusnah masal Irak, mengakhiri dukungan Saddam Hussein kepada terorisme, menggulingkan pemerintahan Sadam Hussein yang otoriter, menjaga keamanan negara-negara.

Selain merupakan bentuk tindakan pengamanan terhadap teroris di dunia, Operasi pembebasan Irak dinyatakan sebagai refleksi atas bentuk kepedulian AS terhadap masyarakat Irak yang berada di bawah tirani Sadam Hussein, menjanjikan pembebasan masyarakat Irak untuk mendapat perlakuan yang selayaknya, dan mencegah serta mengakhiri kasus-kasus pelanggaran HAM dalam negeri Irak.⁶³

Invasi militer AS ke Irak dimulai pada Maret tahun 2003. Tepatnya pada 20 Maret 2003 melalui serangan udara, berakhir pada 9 April 2003 dengan didudukinya Baghdad, ibukota Irak, oleh pasukan AS dan sekutunya.

Setelah jatuhnya rezim Saddam Hussein yang disusun dengan pembentukan Dewan Pemerintah Sementara, ternyata muncul perlawanan-perlawanan bersenjata bahkan hingga hari penyerahan kedaulatan rakyat Irak oleh Amerika Serikat ke Irak 28 Juni 2004. Setelah penyerahan kedaulatan ,

⁶³ “Skandal Abu Gharaib di Irak”. Diakses dari <http://hndrautama.blogspot.co.id/2009/05/skandal-abu-ghraib-di-iraq.html> pada hari Senin 16 April 2018 pukul 21:00 WIB

rakyat masih harus kecewa karena tentara pendudukan masih juga belum pergi dari Irak karena dalih untuk menumpas aksi aksi kelompok bersenjata Irak.

Pada pemilu Irak yang dilaksanakan pada 30 Januari 2005, tentara pendudukan masih menempati Irak dan kelompok-kelompok bersenjata melakukan perlawanan. Aksi penyerangan dan bom bunuh diri masih terus terjadi. Selama pasukan pendudukan masih ada di Irak , maka kelompok bersenjata masih terus beraksi dan selama itu pula rakyat irak masih jauh dari aman.

Invasi Amerika Serikat menimbulkan dampak yang sangat luas bagi setiap elemen di Irak. Organisasi HAM *Iraq Body Count* menyebutkan jumlah korban antara 80. 000 - 87. 000 orang, namun penelitian yang dilakukan Universitas John Hopkins pada tahun 2006, menyebutkan angka 600. 000 korban selama tiga tahun invasi AS ke Irak. Sedangkan WHO (*World Health Organization*) mencatat sejak Maret 2003 sampai Juni 2006 invasi AS ke Irak telah menewaskan 151. 000 warga sipil. Data lain dari jusforeignpolicy.org menyebutkan total warga Irak (sipil maupun tentara) yang tewas berjumlah 1.189.173 jiwa . Invasi AS ke Irak juga menyebabkan hilangnya 170.000 benda sejarah dari peradaban Mesopotamia yang berusia ribuan tahun yang disimpan di Museum Nasional Irak.⁶⁴

Sejak dimulainya invasi pasukan Amerika Serikat (AS) ke Irak pada tahun 2003 dan pendudukan negara Irak oleh Amerika Serikat (AS), banyak

⁶⁴ “The Killing Field di Irak, Ratusan Ribu Warga Sipil Jadi Korban Invasi Irak”. Diakses dari https://www.erasmuslim.com/berita/dunia-islam/quot-the-killing-field-quot-di-irak-ratusan-ribu-warga-sipil-jadi-korban-invasi-as.htm#.WtdeA991_IU pada hari Rabu 18 April 2018 pukul 21:00 WIB

terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap Hukum Internasional khususnya Hukum Humaniter. Pelanggaran-pelanggaran itu berupa tindakan-tindakan penyiksaan yang dilakukan oleh militer AS terhadap tahanan perang di Penjara Abu Ghraib, Irak.

B. Kondisi Penjara Tahanan Perang

Penjara Abu Gharaib terletak di kota Abu Gharaib, sebuah kota terletak di 32 km di sebelah barat Baghdad . kompleks penjara ini di bangun oleh kontraktor Britania pada 1960-an, mencakup areal seluas 1,15 km² dengan total 24 menara pengawal. Luas areal penjara sama dengan luas sebuah kota kecil, dibagi kedalam lima kompleks berdinding untuk berbagai jenis tahanan. Masing-masing blok mempunyai ruang makan, ruang sembahyang, ruang olahraga serta fasilitas kebersihan yang mendasar. Sel-selnya dapat memuat 40 orang di ruangan berukuran 4x4 meter.

Sebelum Amerika Serikat tiba di Irak Pada masa pemerintahan Saddam Hussein, penjara tersebut dikenal sebagai tempat di mana terjadinya penyiksaan terhadap tahanan dan para pembangkang. Sekitar 60 ribu orang yang telah Saddam Husein Jebloskan ke penjara tersebut. Tetapi dibulan Oktober tahun 2002, Saddam Hussein mendeklarasikan amnesti umum untuk membebaskan semua tahanan yang ada dan menutup penjara Abu Ghraib. Penjara Abu Ghraib di Irak secara resmi dibuka kembali pada 4 Agustus 2003

di bawah kepemimpinan militer AS. Penjara tersebut digunakan untuk menahan para tersangka yang dianggap melakukan aktivitas terorisme.⁶⁵

C. Kondisi Tawanan Perang

Selama bulan Maret 2003 hingga Desember 2004, ICRC (*International Comitee of Red Cross*) telah mengunjungi dan mendata 13.611 orang yang ditawan oleh pihak Amerika Serikat dan sekutunya. Sementara itu, diperkirakan ada 5.000 tawanan perang yang ditawan oleh tentara koalisi yang belum pernah dikunjungi dan didata ICRC karena sulitnya mengakses lokasi penawanan. Indikasi adanya penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi terhadap tawanan perang yang dilakukan oleh tentara koalisi di penjara Abu Ghraib terkuak dengan beberapa laporan yang kemudian dipublikasikan di berbagai media massa.⁶⁶

1. Laporan Mayor Jenderal Antonio M. Taguba

Laporan Mayor Jenderal Antonio M. Taguba yang merupakan hasil investigasi dan wawancara Taguba terhadap para tahanan dan sipir serta serdadu Amerika yang terlibat penyiksaan di penjara Abu Ghraib antara Oktober-Desember 2003 . Laporan Taguba mengungkap aksi-aksi sadis, kriminal dan asusila yang dilakukan tentara Kompi ke-372 Polisi Militer Batalion 320 Polisi Militer dan Brigade 800 Polisi Militer pimpinan Janis Karpinski yang bermarkas di Maryland, Amerika Serikat, bertugas di Abu Gharaib sejak November 2003 hingga Maret 2004.

⁶⁵ “ Penjara Abu Gharaib Kembali di Buka Dengan Nama Baru”. Diakses dari <http://www.annah.com/read/2009/02/22/3442-penara-abu-gharaib-kembali> pada hari Minggu 12 Agustus 2018 pukul 11:53 WIB

⁶⁶ Gebi Farida. Loc.Cit

“That between October and December 2003, at the Abu Ghraib Confinement Facility (BCCF), numerous incidents of sadistic, blatant, and wanton criminal abuses were inflicted on several detainees. This systemic and illegal abuse of detainees was intentionally perpetrated by several members of the military police guard force (372nd Military Police Company, 320th Military Police Battalion, 800th MP Brigade), in Tier (section) 1-A of the Abu Ghraib Prison (BCCF). The allegations of abuse were substantiated by detailed witness statements and the discovery of extremely graphic photographic evidence. Due to the extremely sensitive nature of these photographs and videos, the ongoing CID investigation, and the potential for the criminal prosecution of several suspects, the photographic evidence is not included in the body of my investigation. The pictures and videos are available from the Criminal Investigative Command and the CTJF-7 prosecution team. In addition to the aforementioned crimes, there were also abuses committed by members of the 325th MI Battalion, 205th MI Brigade, and Joint Interrogation and Debriefing Center (JIDC). Specifically, on 24 November 2003, SPC Luciana Spencer, 205th MI”. (Annexes 26 and 53) ⁶⁷

“Bahwa antara Oktober dan Desember 2003, di Fasilitas Pengurungan Abu Ghraib (BCCF), banyak insiden penyiksaan kriminal sadis, terang-terangan, dan nakal yang menimpa beberapa tahanan. Penyiksaan yang sistematis dan ilegal terhadap tahanan ini sengaja dilakukan oleh beberapa anggota pasukan penjaga polisi militer (372 Perusahaan Polisi Militer, Batalyon Polisi Militer ke-320, Brigade ke-800 MP), di Tingkatan (bagian) 1-A dari Penjara Abu Ghraib (BCCF). Tuduhan penyalahgunaan dibuktikan dengan pernyataan saksi yang rinci dan penemuan bukti foto yang sangat grafis. Karena sifat yang sangat sensitif dari foto-foto dan video ini, investigasi CID yang sedang berlangsung, dan potensi penuntutan pidana terhadap beberapa tersangka, bukti foto tidak termasuk dalam tubuh penyelidikan saya. Gambar dan video tersedia dari Komando Investigasi Kriminal dan tim penuntutan CTJF-7. Selain

⁶⁷ *Military Report Article 15-6 Investigation of The 800 Military Police Brigade*, hlm. 16.

kejahatan yang disebutkan di atas, ada juga pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Batalyon MI 325, Brigade MI 205, dan Pusat Interogasi dan Pembekuan Bersama (JIDC). Secara khusus, pada 24 November 2003, SPC Luciana Spencer, 205 MI”

Menurut laporan tersebut, tawanan di penjara Abu Ghraib terdiri atas tiga kategori yaitu: pelaku kriminal, tahanan yang diduga terlibat melawan tentara koalisi, dan segelintir pemimpin perlawanan atau bekas pembesar jaman rejim Saddam. Namun jumlah yang paling banyak adalah tawanan yang dituduh terlibat perlawanan, atau perempuan dan anak-anak yang suami atau orangtuanya dituduh melancarkan perlawanan yang mencapai 60% dari total tawanan perang di Abu Ghraib.

Taguba menyatakan pula dalam laporannya bahwa: ⁶⁸

I find that the intentional abuse of detainees by military police personnel included the following acts:

- a. Punching, slapping, and kicking detainees; jumping on their naked feet;*
- b. Videotaping and photographing naked male and female detainees;*
- c. Forcibly arranging detainees in various sexually explicit positions for photographing;*
- d. Forcing detainees to remove their clothing and keeping them naked for several days at a time;*
- e. Forcing naked male detainees to wear women’s underwear:*

⁶⁸ *Ibid*

- f. Forcing groups of male detainees to masturbate themselves while being photographed and videotaped;*
- g. Arranging naked male detainees in a pile and then jumping on them;*
- h. Positioning a naked detainee on a MRE Box, with a sandbag on his head, and attaching wires to his fingers, toes, and penis to simulate electric torture;*
- i. Writing "I am a Rapest" (sic) on the leg of a detainee alleged to have forcibly raped a 15-year old fellow detainee, and then photographing him naked;*
- j. Placing a dog chain or strap around a naked detainee's neck and having a female Soldier pose for a picture;*
- k. A male MP guard having sex with a female detainee;*
- l. Using military working dogs (without muzzles) to intimidate and frighten detainees, and in at least one case biting and severely injuring a detainee; Taking photographs of dead Iraqi detainees. (Annex 25)*

In additional, several detainees also described the following acts of abuse, which under circumstances, I find credible based on the clarity of their statements and supporting evidence provided by other witnesses (Annex 26)

- a. Breaking chemical lights and pouring the phosphoric liquid on detainees;*
- b. Threatening detainees with a charged 9mm pistol;*
- c. Pouring cold water on naked detainees;*

- d. Beating detainees with a broom handle and a chair;*
- e. Threatening male detainees with a rape;*
- f. Allowing a military police guard to stitch the wound of a detainee who was injured after being slammed against the wall in his cell;*
- g. Sodomizing a detainee with a chemical light and perhaps a broom stick;*
- h. Using military working dogs to frighten and intimidate detainees with threats of attack, and in one instance actually biting a detainee.*

Pernyataan Taguba tersebut mencantumkan bahwa bentuk penyiksaan yang telah dilakukan oleh personel militer yaitu :

- a. Pemukulan, penamparan dan penendangan tawanan;
- b. Memaksa tawanan laki-laki dan perempuan melepaskan bajunya (telanjang) kemudian memfoto dan merekamnya dalam video;
- c. Memaksa para tawanan untuk melakukan adegan seksual kemudian difoto;
- d. Memaksa para tawanan bertelanjang selama beberapa hari;
- e. Memaksa tawanan laki-laki yang telanjang untuk memakai pakaian dalam wanita. Hal ini berdasarkan kesaksian Neil A. Wallin petugas medis, “selama saya berada di penjara, saya melihat tawanan pria yang sedang dipindahkan dari kamp 1 ke kamp lain beberapa diantaranya menggunakan pakaian dalam wanita.
- f. Memaksa tawanan laki-laki untuk masturbasi;
- g. Menumpuk tawanan laki-laki yang bertelanjang kemudian menendang mereka;

- h. Menyetrum tubuh para tawanan;
- i. Memasang rantai anjing pada leher tawanan dan mengikatnya;
- j. Para personel polisi militer beramai-ramai memperkosa tawanan perempuan;
- k. Menggunakan anjing untuk memaksa dan mengintimidasi tawanan;
- l. Memfoto jasad tawanan perang;
- m. Menyiram tubuh tawanan dengan cairan fosfor lampu neon;
- n. Mengancam tawanan dengan pistol 9 mm;
- o. Menyiramkan air dingin ke tubuh tawanan yang telanjang;
- p. Memukul tawanan dengan gagang sapu dan kursi;
- q. Membiarkan polisi militer menjahit luka tawanan setelah tubuh tawanan dibanting ke tembok;
- r. Sodomi tawanan dengan menggunakan lampu neon

Selain itu penduduk sipil bukan kombatan ikut termasuk kedalam tawanan perang di penjara Abu Gharaib, tentu saja penduduk sipil tersebut harus segera dilepaskan, sebab penduduk sipil yang ditawan merupakan suatu bentuk penyanderaan yang sangat dilarang dalam Hukum Humaniter. Tidak hanya penduduk sipil yang diperlakukan kejam, akan tetapi para jurnalis tidak luput dari kekejaman Amerika Serikat, 3 orang wartawan dari kantor berita Inggris, Reuters, yang berkewarganegaraan Irak pun mengaku mengalami penyiksaan fisik dan pencabulan selama mendekan di penjara Abu Gharaib.⁶⁹

⁶⁹“Perlindungan Tawanan Perang di Penjara Abu Gharaib Perspektif Hukum Islam”. Loc.Cit

Dalam laporan tersebut, Taguba juga menemukan bahwa personel Polisi Militer tidak pernah menerima pelatihan dalam operasi penahanan. Taguba juga menemukan bahwa sangat sedikit instruksi atau pelatihan yang diberikan kepada personel Polisi Militer sebagai penerapan ketentuan Konvensi Jenewa III 1949 tentang perlakuan terhadap tawanan perang. Terlebih lagi, kurangnya penyediaan naskah konvensi Jenewa sebagai salah satu upaya sosialisasi Konvensi tersebut.

There is a general lack of knowledge, implementation, and emphasis of basic legal regulatory, doctrinal and command requirements within the 800th MP Brigade and its subordinate units (Multiple witness statement in Annex 45-91) (Ada kurangnya pengetahuan umum, implementasi, dan penekanan peraturan hukum dasar, persyaratan doktrinal dan perintah di dalam Brigade MP ke-800 dan unit-unitnya yang terbelakang).

Taguba memberikan penjelasan mengenai hal ini dalam beberapa poin sebagai berikut:⁷⁰

- a. *Neither the camp rules nor the provisions of the Geneva Conventions are posted in English or in the language of the detainees at any of the detention facilities in the 800th MP Brigade's AOR, even after several investigations had annotated the lack of this critical requirement.*

(Baik peraturan kamp maupun ketentuan Konvensi Jenewa tidak diposkan dalam bahasa Inggris atau dalam bahasa tahanan di salah satu

⁷⁰ *Military Report Article 15-6 Investigation of The 800 Military Police Brigade, Op.Cit.*
hlm. 26.

fasilitas penahanan di AOR Brigadir MP ke-800, bahkan setelah beberapa penyelidikan telah mencatat kurangnya persyaratan kritis ini).

- b. *Several interviewees insisted that the MP and MI Soldiers at Abu Ghraib (BCCF) received regular training on the basics of detainee operations; however, they have been unable to produce any verifying documentation, sign-in rosters, or soldiers who can recall the content of this training.*

(Beberapa orang yang diwawancarai bersikeras bahwa Tentara MP dan MI di Abu Ghraib (BCCF) menerima pelatihan reguler tentang dasar-dasar operasi tahanan; namun, mereka tidak dapat menghasilkan dokumen verifikasi, daftar nama masuk, atau tentara yang dapat mengingat konten pelatihan ini).

- c. *There is abundant evidence in the statements of numerous witnesses that soldiers throughout the 800th MP Brigade were not proficient in their basic MOS skills, particularly regarding internment/resettlement operations. Moreover, there is no evidence that the command, although aware of these deficiencies, attempted to correct them in any systemic manner other than ad hoc training by individuals with civilian corrections experience.*

(Ada banyak bukti dalam pernyataan sejumlah saksi bahwa tentara di seluruh Brigade MP ke-800 tidak mahir dalam keterampilan dasar MOS mereka, terutama mengenai operasi pemindahan / pemukiman kembali. Selain itu, tidak ada bukti bahwa komando, meskipun menyadari

kekurangan ini, berusaha untuk memperbaikinya dengan cara sistemik lainnya pelatihan ad hoc oleh individu dengan pengalaman koreksi sipil).

- d. *I find that the 800th MP Brigade was not adequately trained for a mission that included operating a prison or penal institution at Abu Ghraib Prison Complex. As the Ryder Assessment found, I also concur that units of the 800th MP Brigade did not receive corrections-specific training during their mobilization period. MP units did not receive pinpoint assignments prior to mobilization and during the post mobilization training, and thus could not train for specific missions. The training that was accomplished at the mobilization sites were developed and implemented at the company level with little or no direction or supervision at the Battalion and Brigade levels, and consisted primarily of common tasks and law enforcement training. However, I found no evidence that the Command, although aware of this deficiency, ever requested specific corrections training from the Commandant of the Military Police School, the US Army Confinement Facility at Mannheim, Germany, the Provost Marshal General of the Army, or the US Army Disciplinary Barracks at Fort Leavenworth, Kansas.*

(Saya menemukan bahwa Brigade ke-800 MP tidak cukup terlatih untuk misi yang termasuk mengoperasikan penjara atau lembaga pemasyarakatan di Kompleks Penjara Abu Ghraib. Ketika Penilaian Ryder ditemukan, saya juga setuju bahwa unit-unit Brigade MP ke-800 tidak menerima pelatihan khusus koreksi selama periode mobilisasi

mereka. Unit-unit MP tidak menerima penetapan yang tepat sebelum mobilisasi dan selama pelatihan pasca mobilisasi, dan dengan demikian tidak dapat melatih untuk misi tertentu. Pelatihan yang dilakukan di tempat-tempat mobilisasi dikembangkan dan dilaksanakan di tingkat perusahaan dengan sedikit atau tidak ada arahan atau pengawasan di tingkat Batalyon dan Brigade, dan terutama terdiri dari tugas-tugas umum dan pelatihan penegakan hukum. Namun, saya tidak menemukan bukti bahwa Komando, meskipun menyadari kekurangan ini, pernah meminta pelatihan koreksi khusus dari Komandan Sekolah Polisi Militer, Fasilitas Penyulingan Tentara AS di Mannheim, Jerman, Jenderal Provost Jenderal Angkatan Darat, atau Barak Militer Disiplin AS di Fort Leavenworth, Kansas).

- e. *I find that without adequate training for a civilian internee detention mission, Brigade personnel relied heavily on individuals within the Brigade who had civilian corrections experience, including many who worked as prison guards or corrections officials in their civilian jobs. Almost every witness we interviewed had no familiarity with the provisions of AR 190-8 or FM 3-19.40. It does not appear that a Mission Essential Task List (METL) based on in-theater missions was ever developed nor was a training plan implemented throughout the Brigade.* (Saya menemukan bahwa tanpa pelatihan yang memadai untuk misi tahanan internee sipil, personel Brigade sangat bergantung pada individu-individu di dalam Brigade yang mengalami pengalaman koreksi

sipil, termasuk banyak yang bekerja sebagai penjaga penjara atau pejabat koreksi dalam pekerjaan sipil mereka. Hampir setiap saksi yang kami wawancarai tidak mengenal ketentuan AR 190-8 atau FM 3-19.40. Tidak tampak bahwa Mission Essential Task List (METL) yang didasarkan pada misi di dalam teater pernah dikembangkan dan juga merupakan rencana pelatihan yang diterapkan di seluruh Brigade).

Beberapa fasilitas penahanan yang dioperasikan Brigade 800Polisi Militer menawan orang yang dibawa oleh OGAs (*Other Governmnen Agencies*) tanpa mendata identitas tawanan dan alasan penawanan. Tawanan perang ini sering disebut dengan "*Ghost detainees*". Untuk menghindari pemeriksaan ICRC, tawanan perang jenis ini dipindahkan dari satu kamp ke kamp lainnya.

The various detention facilities operated by the 800th MP Brigade have routinely held persons brought to them by Other Government Agencies (OGAs) without accounting for them, knowing their identities, or even the reason for their detention. The Joint Interrogation and Debriefing Center (JIDC) at Abu Ghraib called these detainees "ghost detainees." On at least one occasion, the 320th MP Battalion at Abu Ghraib held a handful of "ghost detainees" (6-8) for OGAs that they moved around within the facility to hide them from a visiting International Committee of the Red Cross (ICRC) survey team. This maneuver was deceptive, contrary to Army Doctrine, and in violation of international law (Annex 53).⁷¹

(Berbagai fasilitas penahanan yang dioperasikan oleh Brigade ke-800 telah secara rutin menahan orang-orang yang dibawa kepada mereka oleh Lembaga Pemerintah Lainnya (OGA) tanpa memperhitungkan mereka, mengetahui identitas mereka, atau bahkan alasan penahanan mereka. Pusat Interogasi dan Pembekuan Bersama (JIDC) di Abu Ghraib menyebut para

⁷¹ *Ibid.*

tahanan ini "tahanan hantu." Paling tidak pada satu kesempatan, Batalyon MP yang ke-320 di Abu Ghraib menggenggam sejumlah "tahanan hantu" (6-8) untuk OGA bahwa mereka berpindah-pindah di dalam fasilitas untuk menyembunyikan mereka dari tim survei Komite Palang Merah Internasional (ICRC) yang berkunjung. Manuver ini menipu, bertentangan dengan Doktrin Angkatan Darat, dan melanggar hukum internasional).

Indikasi adanya penyalahgunaan kekuasaan juga dapat dilihat dari laporan Taguba yang menyatakan adanya kelambatan dalam proses pemindahan tawanan dari kamp satu ke kamp yang lainnya dan kelambatan dalam pembuatan up-date manifes tawanan yang seharusnya dilaksanakan setiap 24 jam sekali, namun dalam kenyataannya dilaksanakan dalam waktu 4 hari.

There was a severe lapse in the accountability of detainees at the Abu Ghraib Prison Complex. The 320th MP Battalion used a selfcreated "change sheet" to document the transfer of a detainee from one location to another. For proper accountability, it is imperative that these change sheets be processed and the detainee manifest be updated within 24 hours of movement. At Abu Ghraib, this process would often take as long as 4 days to complete. This lag-time resulted in inaccurate detainee Internment Serial Number (ISN) counts, gross differences in the detainee manifest and the actual occupants of an individual compound, and significant confusion of the MP Soldiers. The 320th MP Battalion S-1, CPT Theresa Delbalso, and the S-3, MAJ David DiNenna, explained that this breakdown was due to the lack of manpower to process change sheets in a timely manner.⁷²

("Lembar perubahan" untuk mendokumentasikan transfer tahanan dari satu lokasi ke lokasi lain. Untuk akuntabilitas yang tepat, sangat penting agar lembar perubahan ini diproses dan manifes tahanan diperbarui dalam

⁷² Military Report Article 15-6 Investigation of The 800 Military Police Brigade, Op.Cit, hlm 23.

24 jam setelah pergerakan. Di Abu Ghraib, proses ini akan memakan waktu selama 4 hari untuk diselesaikan. Lag-time ini mengakibatkan jumlah Tahanan Nomor Urut Internasional (ISN) yang tidak akurat, perbedaan besar dalam manifest tahanan dan penghuni sebenarnya dari suatu senyawa individual, dan kebingungan yang signifikan dari Tentara MP. Batalion MP 320 S-1, CPT Theresa Delbalso, dan S-3, MAJ David DiNenna, menjelaskan bahwa kerusakan ini disebabkan oleh kurangnya tenaga kerja untuk memproses lembaran perubahan secara tepat waktu.)

Laporan Taguba juga menyebutkan mengenai kondisi kamp-kamp penahanan di Abu Ghraib, dimana penerangan di dalam dan disekitar penjara sangat tidak memadai. Selain itu kapasitas kamp-kamp di Abu Ghraib sudah tidak cukup menampung para tawanan perang.

Dalam kesimpulan laporannya, Taguba menyebutkan bahwa bukti-bukti adanya aksi-aksi sadis, kriminal dan asusila yang dilakukan oleh Polisi Militer dan intelijen Militer menunjukkan para pimpinan Brigade 800 Polisi Militer dan Brigade 250 Intelijen Militer telah gagal memenuhi peraturan yang berlaku, kebijakan dan perintah dalam mencegah kekejaman terhadap para tawanan perang di Penjara Abu Ghraib selama periode Agustus 2003 hingga Februari 2004.

2. Laporan Amnesty International

Laporan Amnesty International yang dipublikasikan pada tanggal 22 Februari 2005 melaporkan adanya kekerasan yang dialami oleh para tawanan perempuan. Dalam laporannya, Amnesty International menulis

tentang kesaksian beberapa tawanan perempuan, dalam keadaan yang sangat ketakutan menceritakan kepada para pekerja hak asasi manusia, bahwa mereka telah mengalami pemukulan, penyiksaan, dan isolasi. Sebagaimana tawanan pria, mereka juga mengalami pelecehan seksual di penjara militer Amerika itu. Semua tawanan perempuan yang bersaksi mengaku diancam akan diperkosa jika tidak mau bekerja sama. Beberapa dari mereka bahkan diinterogasi dalam keadaan telanjang serta menerima pernyataan-pernyataan yang sangat melecehkan martabat dan melecehkan kehormatan.⁷³

⁷³ “Kontroversi Pemerkosaan Tawanan Perang Irak”. Diakses dari <http://muhsinlabib.com/analisis/kontroversi-pemerkosaan-tahanan-perempuan-irak> pada hari Sabtu 25 Agustus 2018 pukul 20.20 WIB